



SIARAN PERS

INDONESIA SIAP DIEVALUASI

Jakarta, 29 Agustus 2017

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang juga sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) memimpin pertemuan dengan para Menteri dan Kepala Lembaga dengan dua agenda penting. *Pertama*, persiapan Indonesia untuk menjadi anggota FATF, *Kedua* penyampaian *progress report* atas pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER).

Pelaksanaan dari penilaian MER yang dilakukan oleh Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) ditandai dengan kegiatan *on-site visit* tim assessor pada bulan November 2017 nanti, yang kemudian hasil penilaian ME tersebut akan ditetapkan pada kegiatan *APG Plenary* yang akan dilaksanakan di Nepal pada bulan Mei 2018.

Melalui rapat komite hari ini, seluruh pemangku kepentingan, baik 16 (enam belas) Kementerian / Lembaga yang merupakan anggota Komite TPPU maupun pemangku kepentingan lainnya selain anggota Komite TPPU tetapi memiliki keterkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, seperti KPK, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial, siap untuk dapat segera melakukan penyesuaian kebijakan dan pengaturan, serta efektivitas pelaksanaannya sesuai dengan *FATF Recommendation*.

Pertemuan yang dilakukan oleh Para Menteri dan Kepala Lembaga hari ini merupakan pertemuan yang memberikan sejarah bagi perkembangan Bangsa kita. “Bila kita dapat melalui ujian ini secara baik, maka nama bangsa akan baik dan harum. Sebaliknya, bila hasilnya kurang baik, konsekuensinya berdampak bagi perkembangan ekonomi dan tatanan pergaulan kita di dunia internasional” ujar Wiranto kepada wartawan di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Untuk itu mari kita semua bekerja keras mematuhi rekomendasi yang ada. Sudah tak banyak lagi waktu untuk kita berbenah. Dan kita harus sudah siap untuk dievaluasi” tambah Wiranto.

Hasil penilaian dari Tim Evaluasi yang dilakukan nantinya sangat signifikan bagi keberadaan Indonesia di kancah internasional. Bila kita, sebagai bangsa dapat melewati ujian ini secara baik maka paling tidak ada 3 (tiga) dampak positif yang diperoleh, yaitu: (1) Indonesia menjadi sejajar dengan negara-negara lain, khususnya selaku anggota G20; (2) Dengan hasil evaluasi yang baik akan mendorong peningkatan *rating investment grade* Indonesia, sehingga berperan dalam meningkatnya investasi, transaksi bilateral dan resiprokal; dan (3) Hasil ini sekaligus memberi sinyal yang kuat tentang komitmen Indonesia terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik di yurisdiksi Indonesia maupun dalam rangka kerjasama regional dan internasional.

Selain itu dengan diakuinya kehandalan rezim AML/CFT Indonesia oleh dunia internasional, maka Indonesia bisa memproklamirkan kepada dunia tentang terjaganya kualitas integritas sistem keuangan Indonesia sehingga sistem keuangan nasional kita tidak bisa dijadikan sarana maupun sasaran kejahatan.

Sebaliknya, bila penilaian Tim Evaluasi yang dilakukan oleh APG hasilnya kurang baik, maka Indonesia akan terancam dimasukkan kedalam daftar negara-negara yang tidak patuh (*non-compliance jurisdictions*) pada *FATF Public Statements*. Implikasi dari tercantumnya Indonesia dalam daftar tersebut adalah kredibilitas Indonesia dalam melakukan transaksi bisnis internasional dan investasi terganggu. Selain itu, Indonesia akan disejajarkan dengan negara-negara dunia ketiga yang rezim antipencucian dan pemberantasan pendanaan terorismenya belum memadai. Implikasi utama lainnya adalah proses keanggotaan Indonesia untuk menjadi anggota FATF bisa dipertimbangkan ulang oleh FATF.

Dalam kesempatan yang sama Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin yang juga sebagai Sekretaris Komite TPPU menyampaikan bahwa pihaknya bekerjasama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU telah melakukan banyak hal untuk mempersiapkan MER, antara lain melakukan pembentukan tim MER Indonesia, menyelenggarakan rapat koordinasi secara intensif dengan seluruh K/L terkait sejak akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini serta melakukan *self assessment* atas kesesuaian seluruh upaya yang telah dilakukan oleh K/L dengan FATF Recommendation.

“Kita telah melakukan upaya optimal, tapi masih perlu dilakukan kerja keras lagi dari setiap pemangku kepentingan agar hasilnya nanti memberikan kepuasan bagi kita semua” kata Kiagus Ahmad Badaruddin.

MUTUAL EVALUATION REVIEW (MER)

Mutual Evaluation adalah serangkaian kegiatan suatu badan internasional (FATF) yang dilaksanakan melalui salah satu organisasi regionalnya (APG Secretariat) untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) suatu yurisdiksi/negara dapat tercapai dengan baik terhadap FATF Recommendation.

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Evaluator/ Assessor yang terdiri dari lembaga internasional tersebut maupun para ahli dibidangnya dari berbagai negara anggota yang ditunjuk sesuai spesifikasinya di sektor keuangan dan sektor penegakan hukum.

Sejak bulan Agustus 1999, Indonesia sudah menjadi anggota dari *Asia Pacific Group (APG) on Money Laundering* bersama dengan 41 (empat puluh satu) negara di kawasan asia pasifik. Pada tahun 2011, keanggotaan Indonesia tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Asia Pacific Group on Money Laundering*. APG merupakan salah satu dari *Financial Action Task Force (FATF) Style Regional Bodies (FSRB)*.

Sebagaimana diketahui FATF telah mengeluarkan dan menetapkan rekomendasi dan standar internasional di bidang anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disebut dengan "*FATF Recommendations*". Setiap anggota APG berkewajiban untuk memenuhi seluruh rekomendasi FATF dan secara berkala dilakukan penilaian (*Mutual Evaluation/ME*) secara "peer-to-peer review" oleh sesama anggota APG terkait pemenuhan rekomendasi-rekomendasi FATF (*40 Recommendations*) dan efektifitas pelaksanaannya.

Keterangan lebih lanjut hubungi :

Firman Shantyabudi, Direktur Kerjasama dan Humas PPATK
Telp : 021 3850455, Mobile : 0812 8387 4810

M. Natsir Kongah, Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK
Telp : 021 3850455, Mobile : 0813 8668 4827